

**SINERGITAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TNI
PADA PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
GUNA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI DESA BONOMERTO KECAMATAN
SURUH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

M. Agda Ihza Mahendra

NPP. 28.0677

*Asdaf Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Politik Pemerintahan*

Email: agdaihzamahendra@yahoo.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): The author focuses on the problem of synergy of stakeholders and social gap towards equitable development in Bonomerto Village with a comparison of Suruh Village. **Purpose:** *synergy of stakeholders and the results of the physical development of the TMMD program towards equitable development in Bonomerto Village.* **Method:** *This research was conducted by using descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used are through interviews, (12 informan) and documentation.* **Result:** *Based on the apprenticeship data of the research results show that the synergy in the TMMD Program is good and can be used as evaluation. The results and impacts of physical development with main and additional targets in the form of road concrete, road rebates, mosque rehabilitation and RTLH benefits to support community's economy and create equitable development in Bonomerto Village. The efforts made are increasing the readiness of the Village Government, the distribution of implementation shifts in the scope of Suruh Subdistrict, Increasing Type IV Self-management through the Formation of Community organisations and Increasing Target..* **Conclusion:** Synergy between stakeholders is going well and the results and impacts of development are maximized, although there are a few inhibiting factors, but supported by supporting factors and efforts to respond quickly, eventually lead to good implications for the running of this program. The author suggests that the synergy in the TMMD program is required for detailed regulation and regulation of the allocation of APBDes, it is necessary to establish and optimize the BUMDes in the construction sector from village funds, optimize the resources of community organizations and attention to the RTLH pointer.

Keywords: *Synergy, The Manunggal TNI Program to build Villages, Equitable Development*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada sinergi stakeholder dan kesenjangan sosial terhadap pemerataan pembangunan di Desa Bonomerto dengan perbandingan Desa Suruh. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergi stakeholder dan hasil pembangunan fisik program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) terhadap pemerataan pembangunan di Desa Bonomerto. **Metode:** Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara (12 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan data magang hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada Program TMMD sudah baik dan bisa menjadi bahan evaluasi, Hasil dan dampak pembangunan fisik dengan sasaran pokok dan tambahan berupa

pembangunan betonisasi jalan, rabat jalan, rehab mushola dan Rumah Tidak Layak Huni memberikan manfaat menopang perekonomian masyarakat dan menciptakan Pemerataan Pembangunan Desa Bonomerto. Upaya yang dilakukan adalah Peningkatan kesiapan Pemerintah Desa, pembagian *shift* pelaksanaan oleh TNI dan Ormas di lingkup Kecamatan Suruh, Peningkatan Swakelola tipe IV melalui Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Peningkatan penyaringan Sasaran RTLH. **Kesimpulan:** Sinergi antar stakeholder berjalan baik dan hasil serta dampak dari pembangunan yang maksimal, walaupun ada sedikit faktor penghambat akan tetapi ditopang oleh faktor pendukung dan upaya cepat tanggap akhirnya menimbulkan implikasi yang baik bagi berjalannya program ini. Guna peningkatan sinergitas dan pemaksimalan Kembali hasil serta dampak pembangunan, penulis menyarankan untuk Sinergi pada program TMMD ini adalah diperlukan regulasi dan pengaturan detail keberuntungan APBDes, diperlukan pembentukan dan pengoptimalan bumdes bidang konstruksi dari dana desa, optimalisasi sumber daya Organisasi masyarakat dan Memperhatikan pointer RTLH. **Kata kunci:** Sinergitas, Program TNI Manunggal Membangun Desa, Pemerataan Pembangunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan menekan angka kesenjangan sosial di Indonesia khususnya pada daerah desa terpencil dan terisolir pemerintah memiliki peranan yang paling penting. Dalam mewujudkan tersebut, Pemerintah membuat Program yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewujudkan salah satu operasi bhaktinya dengan menggandeng pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan TNI berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah mengatur tentang peran dan Tugas pokok TNI dalam Operasi Non Perang yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah (merehabilitasi infrastruktur). Melihat dari pelaksanaan fungsi tersebut, maka dari itu TNI membuat program untuk mengimplementasikan fungsi tersebut dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Di Desa Bonomerto pembangunan secara fisik dilakukan oleh TNI yang Bekerjasama dengan DISPERMASDES dan beberapa elemen masyarakat untuk meningkatkan infrastruktur dalam rangka mempermudah akses dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.¹ Desa Bonomerto merupakan suatu desa terpencil dan terisolir dimana terletak pada ujung Kabupaten Semarang, Desa Bonomerto bersebelahan dengan Desa Suruh yang merupakan pusat Kecamatan akan tetapi kesenjangan sangat terlihat nyata. Berikut data geografis dan prasarana infrastruktur utama di Desa Bonomerto :

Tabel 1
Data Geografis Desa Bonomerto

NO	KEGIATAN	JENIS GEOGRAFIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Penggunaan Lahan	Sawah	164,7 Ha	Luas total 272,10 Ha
		Bukan Sawah	15,25 Ha	-
		Bukan Pertanian	92,10 Ha	-
2	Lahan Pertanian Sawah	Irigasi	116 Ha	Luas Total 164,31 Ha
		Tadah Hujan	48,75 Ha	-
3	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal	9,22 Ha	Luas Total 15,20 Ha
		Hutan Rakyat	5,98 Ha	-
4		Rumah, Bangunan	81,78 Ha	Luas Total 92,58 Ha

¹ [Jatengprov.go.id/beritadaerah/danrem-073-makutarama-tutup-tmmd-desa-bonomerto/](http://jatengprov.go.id/beritadaerah/danrem-073-makutarama-tutup-tmmd-desa-bonomerto/)

Lahan Bukan Pertanian	Jalan, Kuburan, dll	10,80 Ha	-
-----------------------	---------------------	----------	---

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, Diolah Penulis, 2020

Tabel 2
Data Pemerintahan dan Prasarana Desa Bonomerto

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Toko/Warung Kelontong	30	Warung Sederhana
2	Warung Makan	20	-
3	Masjid	9	Kondisi baik
4	Mushola	23	Kondisi kurang baik
5	Lapangan Voli	4	-
6	Lapangan Bulu Tangkis	6	-
7	Lapangan Bola	1	-
8	Jalan Provinsi	2 km	-
9	Jalan Desa	9 km	-
10	Kondisi jalan berbatu	7 km	Rusak

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, Diolah Penulis, 2020

Pelaksanaan program tersebut, TNI melalui Kodam, Korem dan Kodim menggandeng Pemerintah Kabupaten Semarang melalui DISPERMASDES melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah berupa Penyaluran Bantuan Keuangan dengan pencairan dana bantuan keuangan untuk Program TMMD² dan diteruskan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang³, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka dari itu DISPERMASDES berperan dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan penentuan lokasi program karena memiliki data valid. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang dan TNI dalam hal ini Korem Makutarama dan dilaksanakan oleh Kodim Salatiga melakukan pertemuan di Gedung Dharma Satya Lt. 2 Setda Kab. Semarang untuk merumuskan kebijakan dan tahapan pelaksanaan mengenai program TMMD. Berdasarkan payung hukum Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2016 dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati NO. 325/1718/2017 tentang Penetapan Lokasi TMMD dan Bhakti TNI Kabupaten Semarang Tahun 2018 dan ST DANREM 073/MAKUTARAMA NO. ST/50/2018 tentang Perintah untuk Menyusun Rencana SAS Program Terpadu TMMD REG KE-102 & TMMD SENGKUYUNG Tahun 2018 maka sinergitas pelaksanaan program TMMD dilaksanakan di Desa Bonomerto dengan sasaran fisik yaitu pembangunan jalan penghubung dusun (betonisasi dan rabat), pembangunan RTLH dan rumah ibadah (mushola).⁴ Program ini merupakan prioritas bersama karena diharapkan akan menjadikan

² Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018

³ Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

⁴ PAP TMMD REG-102

masyarakat kuat dan berdikari dengan rangka mempercepat pembangunan diharapkan masyarakat dapat bergerak menuju sejahtera dengan peningkatan pendapatan, kehidupan yang layak.⁵

1.2. Permasalahan

Melihat penjelasan singkat dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan membandingkan dengan kondisi masyarakat sekarang, dapat dilihat secara menyeluruh bahwa masyarakat Indonesia masih jauh dari kehidupan yang sejahtera. Kesenjangan Sosial yang penulis contohkan antara Desa Suruh dengan Desa Bonomerto, dimana jelas terlihat perbedaan walaupun berada pada satu wilayah kecamatan yang seharusnya dapat diberlakukan sama atau mendekati supaya masyarakat sama-sama merasakan hasil dari pembangunan baik nasional maupun daerah.

Desa suruh merupakan salah satu desa yang termasuk sejahtera di kecamatan suruh kabupaten semarang, selain sebagai pusat dari perekonomian, desa suruh juga merupakan desa yang penuh dengan tempat industri dan pangan. Desa suruh memiliki pasar suruh yang menjadi pusat jual beli masyarakat kecamatan suruh dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pasar yang besar sehingga dari pasar itu dapat ditarik pajak dan retribusi yang dapat dimanfaatkan guna peningkatan pengelolaan wilayah dan penjual yang ada di dalamnya tidak hanya berasal dari desa tersebut bahkan banyak yang berasal dari kecamatan lain. Selain pusat perekonomian, juga terdapat tempat industri yang cukup terkenal, salah satunya adalah industri pengelolaan sampah, selain itu juga terdapat banyak pengelolaan pangan menjadi setengah jadi dan barang jadi seperti selep padi, selep jagung, pembuatan kerupuk jagung dan lain sebagainya.⁶ Luas wilayah Desa Suruh dan Desa Bonomerto pun hampir sama akan tetapi pengelolaan kawasan yang memang berbeda dan tentunya hal inilah yang memunculkan kesenjangan daerah terkhusus desa yang seharusnya dapat disamaratakan dalam progres pembangunan. Desa Bonomerto merupakan salah satu desa yang masih terlihat asri dengan area persawahan yang luas dan penduduknya mayoritas berprofesi sebagai petani, dimana memang keseharian penduduk hanyalah mengurus sawah dan ladang dengan artian sebagian besar warga banyak yang belum memiliki inovasi untuk mengembangkan mata pencahariannya.⁷

Menurut M. Nurmanto selaku kepala desa Desa Bonomerto tahun 2018, masyarakat Desa Bonomerto belum bisa berkembang seiring peningkatan teknologi dan era 4.0. Selain itu infrastruktur yang mendukung jalannya kehidupan bermasyarakat masih sangat minim, jalan yang digunakan sebagai akses utama masih sangat buruk dan ketika hujan turun pasti berlumpur dan licin sehingga menyebabkan begitu korban berjatuhan, juga akses ibadah yang kurang layak sehingga mengakibatkan kurang nyamannya masyarakat dalam beribadah dan juga akses jembatan yang masih serba kayu sehingga mengakibatkan rawan ambrol ketika digunakan masyarakat untuk keseharian, padahal jalan tersebut menghubungkan antar dusun.⁸ Inilah yang menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk terus mengkaji regulasi dan menciptakan program strategis untuk terus menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admisintrasi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia terutama dalam hal pembangunan dan untuk menjalankan salah satu fungsinya tersebut, Pemerintah membuat Program yang dalam hal ini dilaksanakan oleh TNI untuk mewujudkan salah satu operasi bhaktinya dengan menggandeng pemerintah daerah sebagai pemilik data valid mengenai daerah lokasi program.

⁵ Penjelasan dalam Kegiatan Launching Aplikasi E-TMMD dan indikator penentuan titik lokasi TMMD serta perwujudan sinergitas TMMD di Gedung Graha It.2 Setda Kab. Semarang

⁶ <http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/tata-ruang.html>

⁷ Data desa Bonomerto sebagai sasaran program TMMD reg-102 Kabupaten Semarang

⁸ Suaramerdeka.com/salatiga/2018/

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaksanaan stakeholder terkait maupun hasil dan dampak program TMMD sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian Madva dan Hartuti berjudul Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang (Madva & Hartuti, 2018), menemukan bahwa faktor pendukung yaitu komunikasi, berkaitan dengan transmisi penyaluran informasi melalui rapat koordinasi pesan singkat, kejelasan informasi dengan seringnya para pelaksana melaksanakan rapat koordinasi membuat informasi yang ada pada program TMMD tidak membingungkan dan Faktor penghambat adalah minimnya kuantitas pegawai dan tidak adanya SOP tertulis.⁹ Penelitian Anggrahini Pertiwi Prawinindira berjudul Interaksi Sosial TNI dan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Interaksi Sosial TNI dan Masyarakat Dalam Membangun Sarana Prasarana Transportasi Di Kampung Randusari Rw XXX Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta Melalui Program TNI (Anggrahini Pertiwi Prawinindira, 2011), menemukan bahwa interaksi sosial TNI dan masyarakat dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2010, kerjasama antara TNI dan masyarakat yang timbul sebagai bentuk interaksi sosial membangun sarana prasarana transportasi dalam proses bentuk pembangunan atau peningkatan jalan yang meliputi betonisasi dan pembuatan jembatan pada jalan inspeksi, serta konflik (pertentangan) antara TNI dan masyarakat yang ditimbulkan dari interaksi selama proses pembangunan atau peningkatan jalan. Dengan melakukan betonisasi dan pembuatan jembatan pada jalan inspeksi berlangsung.¹⁰ Penelitian Eny Purwatiningsih berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Eny Purwatiningsih, 2013) menunjukkan bahwa sasaran TMMD yang meliputi sasaran telah dapat terealisasi. Efektivitas pelaksanaan program TMMD sangat berpengaruh positif terhadap ketahanan wilayah. Ditemukan bahwa Program TMMD dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat dan sekaligus dapat menumbuhkan kembali gotong-royong yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan wilayah.¹¹ Penelitian Toruan berjudul Evaluasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Wilayah DKI Jakarta Dan Sekitarnya (Toruan, 2017) menunjukkan bahwa efektivitas kegiatan program TMMD dalam meningkatkan kedekatan personel TNI dengan rakyat masuk dalam kategori sedang. Dengan demikian, hasil kegiatan fisik dan non - fisik Program TMMD TA 2012 di Jakarta dan sekitarnya belum efektif untuk meningkatkan kedekatan TNI dan rakyat.¹² Penelitian Muhamad Abibakrin Nur berjudul Upaya Edukatif Pada Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Muhamad Abibakrin Nur, 2019) menunjukkan bahwa Upaya edukatif dalam program ini yaitu meliputi upaya peningkatan kognitif yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Upaya selanjutnya meliputi upaya peningkatan afektif Upaya yang selanjutnya meliputi upaya peningkatan keterampilan. Tingkat partisipasi masyarakat sebelum dan

⁹ Madva Lwihpakerti, Hartuti Purnaweni.(2018). Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kegiatanprogram TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21939/20188>

¹⁰ Anggrahini Pertiwi Prawinindira (2011). Interaksi Sosial TNI dan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Interaksi Sosial TNI dan Masyarakat Dalam Membangun Sarana Prasarana Transportasi Di Kampung Randusari Rw XXX Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta Melalui Program TNI. *UNS-FISIP Jur. Sosiologi-D.3207011-201*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/19631/Interaksi-Sosial-TNI-dan-Masyarakat-Studi-Deskriptif-Kualitatif-Mengenai-Interaksi-Sosial-TNI-dan-Masyarakat-Dalam-Membangun-Sarana-Prasarana-Transportasi-Di-Kampung-Randusari-Rw-XXX-Kelurahan-Mojosongo-Kecamatan-Jebres-Kota-Surakarta-Melalui-Program-TNI>

¹¹ Eny Purwatiningsih (2011). Efektivitas Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*. <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/6777>

¹² Toruan (2017). Evaluasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Wilayah DKI Jakarta Dan Sekitarnya. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/211>

sesudah mengikuti program ini diukur dari tiga indikator yakni dimensi kontribusi, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.¹³

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni sinergi stakeholder dan hasil pembangunan fisik program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) terhadap pemerataan pembangunan di Desa Bonomerto, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Najiyati (Najiyato, 2011) terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas aktor kepentingan yaitu Komunikasi dan Koordinasi dan juga pendapat dari Kuncoro (Kuncoro, 2003) yang mengategorikan pembangunan menjadi 3 model yaitu *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergi stakeholder dan hasil serta dampak pembangunan fisik program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) terhadap pemerataan pembangunan di Desa Bonomerto.

II. METODE (5-10%)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian kualitatif. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif, Denzin dan Lincoln dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁴ untuk memahami fenomena yang terjadi untuk dipahami sesuai subyek penelitian¹⁵ dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹⁶

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yang lebih terfokus pada observasi partisipatif, wawancara yang mendalam dan dokumentasi di lapangan.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengambil data-data di lapangan pada saat magang. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur agar wawancara tidak terkesan kaku dan penulis dapat memperoleh data lebih terbuka dan tetap pada konteks. Penulis juga menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data-data berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan berkaitan dengan gambaran umum pelaksanaan TMMD Reg-102.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggunakan teknik analisis dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Pattilima. Dalam menggunakan teknik analisis ini peneliti akan mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Kemudian setelah data tersebut terkumpul, penulis akan merangkum data-data tersebut dan menentukan hal-hal pokok yang akan disajikan dalam penyajian data, yang disebut dengan reduksi data dan selanjutnya menyajikan data yang telah direduksi baik dalam bentuk teks naratif, maupun dalam bentuk tabel atau grafik apabila diperlukan. Terakhir penulis akan memverifikasi data-data yang telah terkumpul dan penyajian data yang ada dan selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan.¹⁸

¹³ Muhamad Abibakrin Nur (2019). Upaya Edukatif Pada Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/5430>

¹⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). Hlm.5

¹⁵ Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghimia Indonesia, 2013). Hlm. 84

¹⁶ Moh. Nazir, op. cit. Hlm 75

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Bandung: Alfabeta,2014). Hlm. 308

¹⁸ Hamid Pattilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011). Hlm. 100

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokus Penelitian

Desa Bonomerto merupakan salah satu yang berada di wilayah Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Desa Bonomerto Bonomerto terdiri dari 6 Dusun, 6 RW dan 21 RT Desa dan terletak di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan dengan rata-rata ketinggian berada pada 350 meter di atas permukaan laut dan terletak diantara 110° 32' 1" hingga 110° 28' 47" BT dan 7° 16' 22" hingga 7° 23' 42" LS dengan batas-batas sebelah utara Desa Sukorejo, sebelah barat Desa Medayu, sebelah timur Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dan sebelah selatan Kecamatan Susukan. Desa Bonomerto memiliki luas wilayah 272,10 Ha dengan rincian Pertanian (Sawah) 174,00 Ha dan bukan Pertanian 98,1 Ha dan Penduduk Desa Bonomerto sebagian besar merupakan masyarakat suku Jawa asli Semarang. Jumlah penduduk di Desa Bonomerto adalah 3.120 jiwa yang tersebar di 6 Dusun dengan kepadatan penduduk 1146,64 jiwa/km² dengan luas wilayah yaitu 2,72 km² dengan jumlah penduduk 3120 jiwa dan kepadatan penduduk 1146,64 jiwa/km² dengan selisih rasio jenis kelamin 22 jiwa dan masyarakat yang bekerja sebagai TKI di luar negeri hanya 4 jiwa dan seluruhnya perempuan sedangkan pria kebanyakan berprofesi sebagai petani. Disisi lain pendidikan di Desa Bonomerto masih terbilang sangat terbelakang dengan sarana pendidikan yang menunjang peningkatan SDM.¹⁹ Lokasi Desa Bonomerto yang terpencil dan terisolir mengakibatkan pembangunan terhambat dan buruknya Infrastruktur berdampak pada sektor ekonomi. Berikut data infrastruktur Desa Bonomerto :



Tabel 3
Kondisi Infrastruktur Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Tahun 2018

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah	Kondisi
1	Jalan Penghubung antar Dusun	10	5 bebatuan, 5 tanah liat dan pematang sawah
2	Rumah	37	12 rumah tidak layak huni
3	Mushola	26	19 cukup layak, 7 tidak layak
4	Masjid	6	Cukup layak
5	Sekolah	4	1 tidak layak, 3 cukup layak
6	Balai Desa	1	Baik dan layak

Sumber : PAP TMMD REG-102 Desa Bonomerto, Diolah Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa infrastruktur yang ada di Desa Bonomerto masih jauh dari kata baik, rumah, tempat ibadah dan terlebih pada jalan antar dusun sebagai penunjang bangkitnya sektor perekonomian, ini sangat berbanding terbalik dengan Desa Suruh. Desa suruh memiliki infrastruktur yang sangat layak, mulai dari jalan utama menuju jalan provinsi, jalan penghubung antar ke desa lain, jalan yang menghubungkan antar dusun. Berikut penulis memberikan gambaran terkait perbandingan infrastruktur Desa Bonomerto:

Tabel 4
Perbandingan Infrastruktur Desa Bonomerto dan Desa Suruh Tahun 2018

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	DESA SURUH	DESA BONOMERTO
1	Jalan Penghubung Antar Dusun		

¹⁹ Desa Bonomerto Dalam Angka 2019

2	Jalan untuk menuju jalan Provinsi		
3	Mushola		
4	Rumah Warga		

Sumber : Diolah Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa kesenjangan yang terjadi antara Desa Bonomerto dan Desa Suruh sangat terlihat nyata yang berdampak pada sektor ekonomi di Desa Bonomerto. Sektor yang terpengaruh sebagai berikut :

1. Pertanian

Kurang layaknya infratraktur menyebabkan pertanian di Desa terhambat, terlebih pada pendistribusian, dengan jalan yang kurang layak mengakibatkan distribusi tersendat.

2. Peternakan

Infratraktur yang tidak baik tentu akan berakibat pada kurang maksimalnya hasil panen, peternak harus siap dengan segala resiko yang ada. ketika pakan yang dibutuhkan habis dan peternak membutuhkan vitamin untuk hewan, tidak bisa dengan dadakan karena infrastruktur sangat tidak mendukung.

3. Pengusaha Sembako

Kurang layaknya infratraktur menjadikan pengusaha membutuhkan lebih tenaga dan ongkos untuk belanja pangan yang dibutuhkan masyarakat.

4. Pengusaha Jasa Angkutan

Pengusaha jasa angkutan menjadi profesi yang sangat dirugikan dengan kurang layaknya infratraktur di Desa Bonomerto.

Berdasarkan penjelasan diatas, kurang layaknya infratraktur di Desa Bonomerto berdampak pada berkurangnya sektor ekonomi untuk berkembang dan menstabilkan harga, alhasil dengan harga yang mahal dan kebutuhan masyarakat yang kompleks juga berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Inilah yang menjadikan Desa Bonomerto menjadi lokasi pembangunan program TMMD.

Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 dengan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) dan tahun 2016 berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) dengan visi yaitu “Mewujudkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat”. Berkaitan dengan Program TMMD, urusan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan dan Penataan Desa dengan Tugas Pokok yaitu Melaksanakan tugas Pengembangan dan Penataan Desa dan Fungsi Perumusan kebijakan teknis dan Pengoordinasian.²⁰

²⁰ <https://dispermasdes.semarangkab.go.id>

3.1 Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia merupakan perkembangan dari Badan Keamanan Rakyat yang pada kanvas perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda melalui kekerasan senjata. Selanjutnya pada tahun 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), untuk menyesuaikan susunan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) hingga sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tugas pokok Operasi selain perang²¹ yaitu peran TNI dalam membantu tugas pemerintahan di daerah.

3.2 Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

TNI Manunggal Membangun Desa yang merupakan kegiatan lintas sektoral dengan berbagai Kementerian/LPKN dan komponen masyarakat lainnya yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah terbelakang dan terisolir terutama bersifat fisik seperti kegiatan rehab rumah tidak layak huni, tempat ibadah dan betonisasi jalan yang adad di desa baik jalan penghubung antar dusun ataupun jalan yang bertujuan mempermudah akses masyarakat pada akses perekonomian dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa juga akan meningkat.²²

Program TMMD ini dilaksanakan atas Sinergi Stakeholder yang ada pada lingkup Pemerintah terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Motor Koordinasi dan Komunikasi karena Dinas ini merupakan proyek leader dan perpanjangan tangan langsung sebagai pelaksana dari Pemerintah Daerah sedangkan TNI menjadi penggerak jalannya Pembangunan pada saat Pelaksanaan. Berikut Struktur pelaksanaan TMMD REG-102 di Desa Bonomerto :

Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Sumber : PAP TMMD REG-102 Desa Bonomerto (2018)

²¹ <https://tni.mil.id/>

²² Rakor TMMD Kabupaten Semarang juni 2018

Berdasarkan gambar bagan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Program TMMD merupakan Kerjasama antar instansi Pemerintah dimana Pemerintah Daerah sebagai motor dan TNI pada tingkat resor dan distrik militer sebagai pelaksana lapangan. Berikut Susunan Organisasi Satuan Tugas TNI di lapangan:

Tabel 5
Susunan Organisasi Satgas TMMD

KOMANDO RESOR MILITER 073/MAKUTARAMA
KOMANDO DISTRIK MILITER 0714

Lampiran : Surat Perintah Dandim 0714
Nomor : Sprin / / V /2018
Tanggal : Mei 2018

SUSUNAN ORGANISASI SATGAS TMMD REGULER TA. 2018

NO	NAMA	PKT/GOL CORP	NRP/NIP	JABATAN		KET
				ORGANIK	TUGAS	
1	Prayogha Erawan	Letkol Inf	11990037970677	Dandim 0714/Salatiga	Dansatgas TMMD	
2	Burhanuddin, S.T	Mayor Kav	11980023290772	Kasdim 0714	Wadansatgas	
3	Romdani Fitriadi	Kapten Arh	21980037981074	Pasiter Dim 0714	Koordinator Lap	
4	Samin	Serma	3920591270671	Bati Bhakti TNI Dim 0714	Sekretaris	
5	Sugito	Kapten Czi	548161	Pasilog Dim 0714	Bendahara	
6	Sarjono	Kapten Cprm	21940125280173	Pasi Intel Dim 0714	Pengamanan	
7	Noor Rofiq	Kapten Chb	21930131620672	Pasiops	Rah Pasukan	
8	Joko Sukarwan	Kapten Inf	573560	Pasipers	Personel	
9	Kisnani	Polda	638577	Kapok Tuud	Perfengkapan	
10	Ashudi	Peltu	21950112710175	Bati Wanwil	Ba Kotis	
11	Indro Wicaksono	Pelda	21970077490575	Bati Komsos	Anggota	
12	Wagiman	Serka	31940500700672	Bamin Siter	Anggota	
13	Ismadi	Peltu	21930093760171	Bati Ops	Sie Upacara	
14	Nurkolis	Peltu	633543	Batimin Pers	Anggota	
15	Wahyuda Widarta	Serma	21990126710978	Pendim 0714/ Slg	Sl. Dokumentasi	

Komandan Kodim 0714/Salatiga,

Prayogha Erawan
Letnan Kolonel Inf NRP 11990037970677

Sumber : PAP TMMD REG-102 Desa Bonomerto (2018)

Anggaran Pelaksanaan bersumber dari Pemerintah Daerah dan dana desa. Pembagian anggaran sebagai berikut :

Gambar 2
Anggaran TMMD Tahun 2018



ANGGARAN TMMD



➤ APBD PROV JATENG	= Rp. 160.000.000 ,-
➤ APBD KAB. SEMARANG (BLT)	= Rp. 427.400.000 ,-
➤ APBD KAB. SEMARANG (BLM)	= Rp. 130.000.000 ,-
➤ UPC. BUKA & TUTUP TMMD	= Rp. 13.750.000 ,-
➤ DANA DESA BONOMERTAO	= Rp. 300.000.000 ,-
➤ J U M L A H	= Rp. 751.150.000 .-

Sumber : PAP TMMD REG-102 Desa Bonomerto (2018)

Data diatas merupakan sumber anggaran pendanaan Program TMMD REG-102 secara utuh. Berikut juga dijelaskan lebih lanjut terkait anggaran satgas administrasi TNI dilapangan :

Gambar 3
Anggaran Satgas Pelaksana
Lapangan TMMD Tahun 2018



Administrasi	
Anggaran Satgas	
Y UANG SAKU (150 x 32 x Rp. 15.000 ,-)	= Rp. 72.000.000 ,-
Y UANG MAKAN (150 x 32 x Rp. 43.000,-)	= Rp. 206.400.000 ,-
Y KODAL	
Y - KODAL KOREM	= Rp . 6.000.000,-
- KODAL KODIM	= Rp. 5.500.000 ,-
- KODAL SSK	= Rp. 5.000.000 ,-
Y GIAT OPS TMMD	
- BAHAN PENDUKUNG	= Rp. 5.000.000 ,-
- DUKUNGAN KESEHATAN	= Rp. 3.000.000 ,-
Y SERPAS TMMD	= Rp. 8.000.000 ,-
Y DOKUMENTASI	= Rp. 4.000.000,-
Y BAHAN KONTAK	= Rp. 15.000.000,- +
J U M L A H	= Rp. 329.900.000 ,-

**“ UANG MAKAN DIMASAK & DIMAKAN
 BERSAMA MASY PEMILIK RUMAH YG DITENPATI”**

Sumber : PAP TMMD REG-102 Desa Bonomerto (2018)

Berdasarkan data diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran yang digunakan dalam Pelaksanaan Program TMMD ini adalah gabungan, anggaran Pemerintah daerah baik provinsi dan juga kabupaten serta APBDes Desa Bonomerto yang digunakan sebagai Dana Pembelian bahan material dan hal teknis lainnya sedangkan anggaran TNI sebagai anggaran pendukung termasuk konsumsi personil pelaksana TMMD di lapangan.

Peran desa pada program ini selain sebagai obyek pembangunan, desa juga bertindak sebagai subyek pembangunan, dimana masyarakat desa juga ikut serta dalam pembangunan tersebut, untuk itu, Pemerintah Desa membentuk Kelompok Masyarakat sebagai pelaksanaan swakelola IV sebagai perwakilan desa.

Berdasarkan penjelasan mengenai program diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Program TMMD ini adalah program bersama yang dilaksanakan seluruh stakeholder terkait baik Dinas Pmeberdayaan Masyarakat Desa dengan ditunjang Dinas terkait sesuai tupoksi kelembagaannya, TNI dalam hal ini Kodim 0714/Salatiga dan Pemerintah desa serta pastisipasi aktif Masyarakat Desa sendiri.

3.3 Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada Program TMMD tahun 2018 di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

Sinergitas Pemerintah Daerah dan TNI dibutuhkan untuk menunjang akselerasi pembangunan agar terus bertahap mewujudkan pembangunan yang merata di Indonesia terlebih pembangunan di wilayah perbatasan.

Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada Program TMMD ini berkaitan erat dengan Pemerataan Pembangunan di Desa terpencil dan terisolir karena tujuan program ini adalah mendorong pembangunan yang merata secara menyeluruh untuk menunjang kehidupan social ekonomi masyarakat. Landasan Normatif yang berkaitan dengan Sinergitas Dinas pada dalam Program TNI Manunggal Membangun Desa adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah
- d. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
- e. Surat Keputusan Bupati Semarang NO. 325/1718/2017 tentang Penetapan Lokasi TMMD dan Bhakti TNI Tahun 2018
- f. Surat Telegram DANREM 073/MAKUTARAMA NO. ST/50/2018 tentang Perintah untuk Menyusun Rencana SAS Program Terpadu TMMD REG KE-102 & TMMD SENGKUYUNG Tahun 2018

Landasan Normatif tentang Sinergitas Dispermasdes dan TNI secara tersurat terdapat pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Melihat dari penjelasan diatas, penulis mendapatkan informasi dan penjelasan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Koordinator Umum Pelaksanaan TMMD bahwa sinergi yang dibangun oleh dinas dan korem/kodim berjalan baik dan terarah Sinergitas ini dibangun atas dasar kesamaan tupoksi antar Lembaga pemerintahan, dalam hal ini pemerintah daerah sesuai peraturan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan desentralisasinya untuk membangun daerah sesuai keperuntukannya, dimana kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dimana kami menjadi pelaksana dalam penataan dan pembangunan desa dengan anggaran yang didapat dari APBD Provinsi dan juga APBD Kabupaten melalui proses pengajuan kepada Bupati sekaligus bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Semarang NO. 325/1718/2017 tentang Penetapan Lokasi TMMD dan Bhakti TNI Kabupaten Semarang Tahun 2018, sedangkan anggaran dari TNI diperuntukkan bagi anggota TNI itu sendiri sebagai bekal mobilitas pasukan dalam pelaksanaan Program TMMD.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba memperoleh informasi melalui beberapa informan pelaksana sinergitas yaitu kepala bidang penataan dan pengembangan desa serta koordinator umum pelaksanaan dimana didapatkan kesimpulan bahwa TMMD merupakan program reguler yang dilaksanakan secara terpadu antara TNI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Instansi terkait yang bertujuan mensinergikan program pembangunan guna meningkatkan percepatan pembangunan dan taraf hidup masyarakat. Perubahan regulasi dan karakteristik masyarakat saat ini membawa perubahan signifikan dalam perwujudan hasil dan dampak serta kompleksnya tuntutan masyarakat dalam penentuan titik lokasi ditentukan secara transparan. Ada dua tahapan penting dalam sinergitas ini, yaitu:

a. Tahap Perencanaan

perencanaan ini terdapat 3 tahapan penting yang erat kaitannya dengan terselenggaranya Sinergitas, yaitu:

- Penyusunan regulasi terkait dengan indikator penentuan titik lokasi TMMD dan upaya perwujudan sinergitasnya.
- Pensinergian stakeholder
- Perwujudan pelaksanaan kegiatan melalui Swakelola Tipe IV

Memperkuat hal tersebut, maka Penulis mencoba mendapatkan Informasi lebih lanjut coba didapat dari bapak Dewanto L. Widagdo selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Penataan Desa Tahun

2018 Tahun 2018 pada tanggal 12 Januari 2021 bahwa ketiganya merupakan tahapan penting yang harus diperhatikan untuk menunjang kesuksesan program TMMD.

b. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan realisasi dari perencanaan yang telah dibuat sebagaimana penyampaian oleh Kepala DISPERMASDES dan Koordinator Umum bahwa Tahapan pelaksanaan merupakan lanjutan dari perencanaan yang telah disepakati, tahapan ini sangat penting untuk memantapkan hasil yang akan diraih, mengingat ini merupakan TMMD REG maka segala persiapan harus matang, mulai dari personil, kebutuhan material dan pelaksanaan pembangunan yang terkoordinir, disini terlihat pentingnya sinergi dengan pihak terkait dan kesamaan persepsi dimana TNI dan masyarakat berperan sebagai penggerak dan pelaksana sedangkan Dinas sebagai motor, Adapun beberapa rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan sebagai berikut :

a. Persiapan dan Penetapan Personil

Persiapan personil sangat menentukan cepat tanggapnya dalam pembangunan, Adapun personil yang ditugaskan dalam program ini sebagai berikut:

Gambar 4
Susunan Organisasi Tim
Program TMMD Reguler TA. 2018

✓ KATIM	: DANRAMIL 02/PABELAN
✓ WAKATIM	: DANRAMIL 03/GETASAN

STAF RELEASE	TIM LAAPANGAN
1. SERTU KULAFAK (06)	➤ SERDA PUJIYONO
2. SERDA KUNDORI (08)	➤ KOPDA SIJADIN (09)
3. SERTU AHMAD (14)	➤ SERDA YULI (02)
4. SERTU ROKIMIN (13)	➤ SERDA RIDHO (09)
5. SERDA SRIYANTO (06)	➤ SERDA MASKUR (03)
6. SERDA ARWANI (05)	➤ SERDA HADI (09)
7. SERDA AGUNG (07)	➤ SERKA BAMBANG (07)
8. KOPTU DWI WIBOWO (16)	➤ SERTU HENDI
9. KOPDA KRISNA (12)	➤ SERDA SUNARDI
10. SERDA SRI YANTO	➤ SERDA REFLI
11. SERDA SASMITO (06)	➤ SERTU SAMIDI
12. SERTU HARYANTO (15)	➤ SERMA LAKSONO\
13. SERDA RUDI	➤ SERTU BASUKI
14. SERTU IMAM (15)	➤ SERDA IWAN

Sumber : PAP TMMD REG-102 Desa Bonomerto (2018)

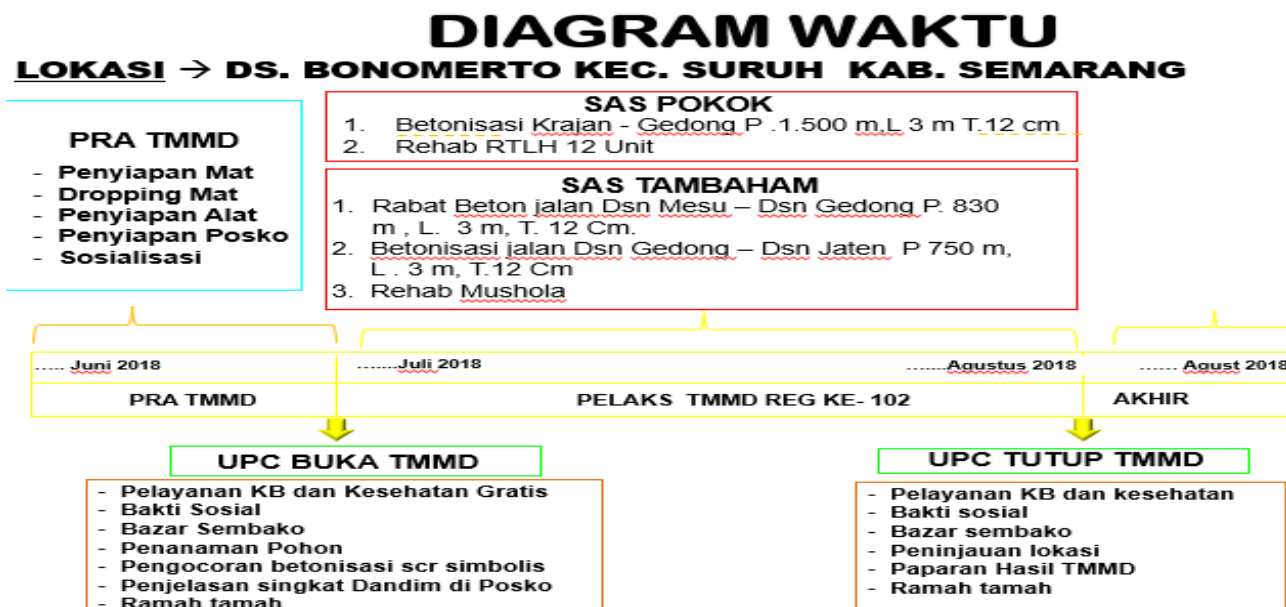
a. Persiapan Material Pembangunan

persiapan material bangunan dan dana operasional yang bersumber dari APBD. Sebagaimana penyampaian pelaksana lapangan sekaligus kabid penataan dan pengembangan desa tahun 2018 bahwa tahapan selanjutnya adalah persiapan material, tahapan ini melalui beberapa tahapan lagi, yaitu Penyiapan Material, Penyiapan Posko, Dropping Material dan Penyiapan Alat.

b. Pelaksanaan Pembangunan Sasaran

Tahapan terpenting dalam proses penuksesan ini dengan tujuan agar program berjalan sesuai sasaran. Penyampaian Koordinator Umum (Kapten CPM Sarjono) bahwa Pelaksanaan pembangunan sasaran pokok yaitu betonisasi jalan dan juga pembangunan RTLH sebanyak 12 titik serta sasaran tambahan yaitu betonisasi jalan, rabat beton dan rehab mushola. Berikut diagram pelaksanaan :

Gambar 5
Diagram Waktu Pembangunan



Sumber: PAP TMMD REG-102 Desa Bonomerto (2018)

Penulis menganalisis mengenai Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada Program TMMD ini berkaitan erat dengan Pemerataan Pembangunan di desa terpencil dan terisolir dengan teori dari Naivati yang memiliki 2 dimensi utama. Kesimpulan analisis sebagai berikut :

1. Komunikasi terdapat 2 variabel, yaitu :

a. Memindahkan stimulan guna mendapatkan respon

Berdasarkan informan Kepala DISPERMASDES dan Koordinator Umum pelaksana lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa pemberian arahan dan stimulan dari atasan kepada anggota selaku pelaksana kebijakan di lapangan sangat penting. Kejelasan pengarahan dari pimpinan kepada bawahan akan menjadi patokan kepada jalannya suatu kebijakan apakah baik atau buruk atau biasa saja, dan komunikasi pun dapat dijalani melalui komunikasi formal ataupun informal yang penting inti dari penyampaian dapat diterima dengan ielas dan ditindaklanjuti dengan baik bahkan dari penyampaian saja sudah dapat menjadi motivasi tersendiri bagi.

b. Berorientasi pada penerima dalam menanggapi stimulus yang diberikan

Berdasarkan informan Kabid Penataan dan pengembangan desa, staf pelaksana TNI dan Camat Suruh, penulis menarik kesimpulan bahwa pemberian arahan dan stimulan dari atasan kepada anggota selaku pelaksana kebijakan di lapangan sangat penting. Kejelasan pengarahan dari pimpinan kepada bawahan akan menjadi patokan kepada jalannya suatu kebijakan apakah baik atau buruk atau biasa saja, dan komunikasi pun dapat dijalani melalui komunikasi formal ataupun informal yang penting inti dari penyampaian dapat diterima dan ditindaklanjuti.

2. Koordinasi memiliki 2 variabel, yaitu :

a. Pengintegrasian tujuan kearah yang sama dan sumberdaya dari berbagai instansi pemerintahan maupun non pemerintahan

Berdasarkan informan Kepala Dispermasdes, Koordinator Umum, Camat Suruh dan Kades Bonomerto dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dibangun sangat maksimal mulai dari penentuan tujuan, sinkronisasi kegiatan berjalan hingga penempatan personil sebagai wujud cepat tanggap dalam pelaksanaan dan pengerahan SDM dengan maksimal serta gotong-royong akan tetapi disini masih ada kendala yang dikeluhkan oleh pihak desa Ketika permintaan dari pihak dinas dan TNI yang serba dadakan disini desa merasa tertekan.

b. Menciptakan tatanan pelaksanaan yang terarah baik dengan koordinasi vertikal maupun horizontal

Berdasarkan informan Kepala Dispermasdes, Koordinator Umum, Camat Suruh dan Kades Bonomerto ditarik garis besar bahwa koordinasi yang dibangun oleh stakeholder terkait sangat baik, dimana terjadi saling mendukung segala bentuk kegiatan untuk merealisasikan sasaran program.

3.4 Hasil dan dampak dari Sinergitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI dalam bentuk pembangunan fisik pada Program TMMD Tahun 2018 di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

Peneliti menganalisis hasil dan dampak sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada program TMMD ini menggunakan teori Pembangunan dari Kuncoro yang memiliki 3 dimensi utama. Kesimpulan analisis sebagai berikut yaitu:

1. Economic growth (Pertumbuhan)

a. Akumulasi modal

Berdasarkan keenam informan yang meliputi 3 Profesi mayoritas masyarakat (Petani, Peternak dan Pengusaha) dan 3 Penerima hasil pembangunan RTLH, penulis simpulkan dengan adanya pembangunan fisik dapat meningkatkan meningkatkan hasil produksi dan penghasilan dari setiap kegiatan perekonomian masyarakat

b. Peningkatan Tenaga Kerja

Berdasarkan ketiga informan yang meliputi 3 Profesi mayoritas masyarakat (Petani, Peternak dan Pengusaha), penulis simpulkan bahwa adanya pembangunan fisik dapat membantu memperlancar kinerja menjadi meningkat kualitas kerja, dan menjadikan banyak warga sekitar yang bekerja di Desa Bonomerto tanpa mengkhawatirkan jalan yang ditempuhnya membahayakan keselamatannya.

c. Kemajuan Teknologi

Berdasarkan ketiga informan yang meliputi 3 Profesi mayoritas masyarakat (Petani, Peternak dan Pengusaha), penulis gambarkan bahwa dengan adanya pembangunan sasaran pokok jalan 1500 m yang merupakan jalan antar dusun yang juga sampai pada titik poin jalan raya dapat membuka akses untuk pengusaha dan semua profesi untuk menggunakan peralatan modern yang pada dasarnya membutuhkan jalan yang lebar dan layak untuk dilewati alat pengangkutnya.

2. Basic needs (kebutuhan dasar)

a. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan

Berdasarkan keenam informan yang meliputi 3 Profesi mayoritas masyarakat (Petani, Peternak dan Pengusaha) dan 3 Penerima hasil pembangunan RTLH, penulis menarik kesimpulan dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan berpengaruh kepada peningkatan sumber pangan pertanian dan juga terpenuhinya sandang, papan dan pangan warga, dari dulu warga selalu melihat pembangunan desa sebelah yang terkesan timpang sekali tapi dengan adanya program ini sedikit demi sedikit dapat disandingkan, akan tetapi ada kendala yang harus diperhatikan lagi yaitu input data rumah yang layak untuk mendapatkan program rumah tidak layak huni dari Program TMMD ini sehingga mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat.

b. Akses terhadap pelayanan publik

Berdasarkan keenam informan yang meliputi 3 Profesi mayoritas masyarakat (Petani, Peternak dan Pengusaha) dan 3 Penerima hasil pembangunan RTLH dapat penulis simpulkan bahwa setiap kesadaran harus ada faktor pendorongnya, bahkan dengan adanya program ini membuat masyarakat merasakan hadirnya negara dan melaksanakan kewajibannya selaku warga negara.

3. People centered (pemberdayaan)

a. Peningkatan perkembangan manusia

Berdasarkan pernyataan ketiga informan yang meliputi 3 Profesi mayoritas masyarakat (Petani, Peternak dan Pengusaha) penulis menarik garis besar bahwa dengan adanya program mampu membuat masyarakat semakin mau dan mampu untuk berkembang, disinilah kita dapat lihat bahwa desa yang terisolir harus dibangun sama rata dengan desa lainnya.

b. Kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability

Berdasarkan keenam informan yang meliputi 3 Profesi mayoritas masyarakat (Petani, Peternak dan Pengusaha) dan 3 Penerima hasil pembangunan RTLH, dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya program TMMD yang membangun infrastruktur, berdampak pada kesejahteraan, kesamaan dan keseimbangan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan deskripsi oleh penulis diatas, dapat kita simpulkan bahwa pemerataan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat nyata adanya, dengan hasil tersebut maka masyarakat Desa Bonomerto tidak lagi merasa ketimpangan infratraktur penunjang ekonomi dengan infratraktur di Desa Suruh sebagai desa pembanding dan *impact* yang dirasakan masyarakat terumatan masyarakat profesi petani, peternak dan pengusaha yang merupakan mayoritas profesi masyarakat desa juga sangat baik, dengan meningkatnya kualitas pekerjaan dan meningkatnya hasil produksi atas dimanfaatkannya peralatan modern dan kenyamanan kerja yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Bonomerto secara menyeluruh.

3.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada Program TMMD tahun 2018 guna Pemerataan Pembangunan di Desa Bonomerto Kecamatan suruh Kabupaten Semarang

Suatu kebijakan yang berbentuk program dapat berjalan sebagaimana mestinya harus didukung oleh faktor-faktor yang yang biasa disebut faktor pendukung, sementara dalam pelaksanaannya tentu ada juga yang menghambat pelaksanaan yang biasa disebut faktor penghambat. Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada Program TMMD tahun 2018 guna Pemerataan Pembangunan penulis menemukan adanya kedua factor, yaitu:

1. Faktor Pendukung

a. Sinergi yang terbentuk antar stakeholder

Sinergi yang terbentuk antar stakeholder menjadi penguat utama jalannya pelaksanaan dengan melalui dinas terkait melaksanakan kerjasama untuk keberhasilan pembangunan dan Pemerintah Desa yang aktif.

b. Partisipasi Aktif Masyarakat Desa

Partisipasi aktif masyarakat desa dengan gotong-royong untuk membantu TNI mengerahkan tenaga untuk mempercepat penyelesaian.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya pengarahan awal kepada Pemerintah Desa

Kurangnya pengarahan awal kepada Pemerintah desa menjadikan desa tertekan dengan kebutuhan mendadak .

b. Keterbatasan waktu

Keterbatasan waktu berdampak pada akhirnya memunculkan terforsirnya tenaga karena jam kerja yang tinggi.

c. Keterlambatan Material

Keterlambatan material bangunan menjadi penyebab utama lambatnya pembangunan.

d. Kekeliruan identifikasi Sasaran Pokok RTLH

Terdapat kekeliruan dalam kesamaan identifikasi penentuan ciri pada ketentuan pembangunan.

3.6 Upaya Peningkatan dan Implikasi Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada Program TMMD tahun 2018 guna Pemerataan Pembangunan di Desa Bonomerto Kecamatan suruh Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat dilihat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Sinergi pada Program TMMD guna Pemerataan Pembangunan, antara lain :

1. Peningkatan kesiapan Pemerintah Desa Bonomerto harus menjadi prioritas utama terlebih dalam pengaturan penggunaan anggaran APBDes sebagai anggaran tambahan.
 2. TNI harus mengatasi keterbatasan waktu dan mengejar target pencapaian, maka dari itu diperlukan pembagian *shift* kerja sama TNI dengan ormas di lingkup Kecamatan agar tidak terforsir.
 3. Peningkatan Swakelola tipe IV oleh Pemerintah Daerah melalui Pembentukan Kelompok Masyarakat sebagai penyedia bahan material, sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP No 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Barang/Jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola apabila memenuhi jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan dan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat.
 4. Peningkatan proses penyaringan sasaran RTLH oleh TNI dari data DISPERMASDES karena pelaksanaan rehab RTLH bersumber dari APBD Kabupaten Semarang.
- Sinergitas yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI ini juga menyebabkan implikasi atau pengaruh untuk siklus sosial yang ada di Lingkup sekitar pointer lokasi Program TMMD REG-102, diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Bonomerto melibatkan banyak pihak baik dari Dinas, TNI maupun masyarakat, menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi.
2. Pelaksanaan pada desa tertinggal menjadikan desa lebih baik dalam pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi dan menjadikan masyarakat memiliki dorongan kuat untuk bangkit dengan memanfaatkannya agar meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan masyarakat dapat bersaing.
3. Kebijakan atas program ini menciptakan semangat baru masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri secara ekonomi dan sosial dengan terbukanya akses perekonomian yang layak agar tidak tertinggal secara infrastruktur.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah yang dibangun atas sinergi Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI dalam hal ini dilaksanakan oleh Korem Makutarama dan Kodim Salatiga berjalan sangat baik, adanya sinergi ini menjadikan masyarakat yang tadinya memiliki kehidupan yang terbelakang akibat kurang diperhatikannya infrastruktur penunjang ekonomi dan juga kegiatan social, mengakibatkan dampak yang cukup serius hingga mengakibatkan kesenjangan yang nyata pada sisi kehidupan manusia. Penulis menemukan temuan penting yakni dimana program ini berjalan juga atas sinergi masyarakat desa selain sebagai objek pembangunan, masyarakat desa juga menjadi subjek pembangunan. Sama halnya dengan temuan Muhamad Abibakrin Nur berjudul Upaya Edukatif Pada Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Muhamad Abibakrin Nur, 2019) menunjukkan bahwa Upaya edukatif dalam program ini yaitu meliputi upaya peningkatan kognitif yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Upaya selanjutnya meliputi upaya peningkatan afektif Upaya yang selanjutnya meliputi upaya peningkatan keterampilan. Tingkat partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti program ini diukur dari tiga indikator yakni dimensi kontribusi, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Layaknya program lainnya, Program TMMD Reguler 102 ini juga memiliki kekurangan yang menjadi hambatan dan beberapa faktor pendorong, hambatan diantaranya adalah sedikitnya pelaksana lapangan dengan keterbatasan waktu, adanya pihak ketiga yang terkesan memperlambat kebutuhan material dan tertekannya desa karena kurang penguasaan dari awal terlebih pada anggaran, pendorong

yang dirasakan dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antar stakeholder dan partisipasi masyarakat aktif itu sangat membantu kelancaran dan kesuksesan program. Sebagaimana juga temuan dari Madva dan Hartuti berjudul Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang (Madva & Hartuti, 2018), menemukan bahwa faktor pendukung yaitu komunikasi, berkaitan dengan transmisi penyaluran informasi melalui rapat koordinasi dan pesan singkat, kejelasan informasi dengan seringnya para pelaksana melaksanakan rapat koordinasi membuat informasi yang ada pada program TMMD tidak membingungkan dan Faktor penghambat adalah minimnya kuantitas. Selanjutnya pelaksanaan yang sesuai dengan sasaran maka akan menjadikan tujuan dari pelaksanaan program ini berhasil guna dan berdaya guna, pembangunan fisik yang nyata maka akan menjadikan peningkatan ketahanan pangan dan wilayah tersebut. Seperti temuan Eny Purwatiningsih berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Eny Purwatiningsih, 2013) menunjukkan bahwa sasaran TMMD yang meliputi sasaran telah dapat terealisasi. Efektivitas pelaksanaan program TMMD sangat berpengaruh positif terhadap ketahanan wilayah.

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mencerdaskan masyarakat, meningkatnya SDM secara menyeluruh, sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat layaknya Anggrahini Pertiwi Prawinindira berjudul Interaksi Sosial TNI dan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Interaksi Sosial TNI dan Masyarakat Dalam Membangun Sarana Prasarana Transportasi Di Kampung Randusari Rw XXX Kelurahan Mojoosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta Melalui Program TNI dimana bentuk pembangunan atau peningkatan jalan yang meliputi betonisasi dan pembuatan jembatan pada jalan inspeksi akan menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat (Anggrahini Pertiwi Prawinindira, 2011).

IV. KESIMPULAN

Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI dalam Pelaksanaan Pembangunan bidang fisik TMMD REG-102 di Desa Bonomerto berjalan baik, walaupun masih ada kekurangan terkait kebutuhan lapangan, hal tersebut masih dapat diatasi oleh *stakeholder* terkait dan menjadi bahan evaluasi kedepannya, pencapaian ini didasari dengan hasil pelaksanaan TMMD REG-102 sesuai dengan sasaran perencanaan program yaitu berupa pembangunan betonisasi jalan, rabat jalan, rehab mushola dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan *impact* dari Pembangunan fisik menjadikan Desa Bonomerto memiliki infrastruktur penunjang perekonomian yang layak dan berhasil menciptakan pembangunan yang merata ketika dibandingkan dengan desa lainnya (Desa Suruh) sehingga meningkatkan sektor-sektor ekonomi (Pangan dan Jasa) di Desa Bonomerto dengan faktor pendukung berupa Sinergi yang terbentuk antar *Stakeholder* dan Partisipasi Aktif Masyarakat Desa Bonomerto maka hambatan berupa Kurangnya pengarahan awal kepada Pemerintah Desa, Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Program TMMD, Keterlambatan Material Bangunan, Kekeliruan identifikasi RTLH dapat diatasi dengan memaksimalkan dengan upaya mengatasi masalah tersebut seperti meningkatkan proses penyaringan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Peningkatan Swakelola tipe IV melalui Pembentukan Kelompok Masyarakat, pembagian *shift* pelaksanaan agar tenaga pelaksana pembangunan di lapangan tidak terus terforsir dan Peningkatan kesiapan (APBDes) Pemerintah Desa Bonomerto dalam menyikapi kesiapan penggunaan yang mendesak. Implikasi dari Sinergitas ini yaitu Keterlibatan banyak unsur menunjukkan koordinasi dan kepercayaan masyarakat tinggi, Pelaksanaan TMMD 2018 di Desa Bonomerto sebagai daerah yang tertinggal, terisolir dan terpencil di Kabupaten Semarang menjadikan Desa Bonomerto lebih layak dan maju dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan penghubung dusun sebagai akses perekonomian dan

Menciptakan semangat baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri dan mengembangkan taraf hidup secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan berguna untuk meningkatkan Sinergitas Pada Program TMMD, sebagai berikut :

1. Diperlukan regulasi secara detail terkait keberuntungan APBDes sebagai dana tambahan, dan penyelesaian program yang tanggung TMMD.
2. Diperlukan pembentukan bumdes bidang konstruksi dari dana desa (DD) yang kemudian dioptimalkan perannya sebagai mitra kerja profesional.
3. Diperlukan optimalisasi sumber daya Organisasi masyarakat guna mengatasi keterbatasan waktu dan mempercepat pembangunan sesuai target.
4. Memperhatikan kembali pointer sasaran pokok RTLH yang bersumber dari data dan APBD Kabupaten Semarang RTLH.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Bonomerto dan lokasi lainnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada TNI, Pemerintah Kabupaten serta Dinas terkait, Pemerintah Kecamatan, Desa dan Masyarakat Desa Bonomerto beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Handoko, T Hani. (2003) *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Moleong, Lexy J. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Mohammad. (2013) *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurcholis, Hanif, dkk. (2016) *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota Edisi 3*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Pattilima, Hamid. (2011) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. (2010) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Jakarta: Refika Aditama
- Sunyoto, Usman. (2004) *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

B. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

C. Sumber-Sumber Lain

- Jurnal

Nurdiansyah, Didin (2014). “Pelaksanaan Pembangunan Fisik Oleh Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Universitas Galuh*. Ciamis: FISIP Universitas Galuh.

Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). “Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development)”, *Jurnal Ketransmigrasian Vol. 28 No. 2* Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Kemenakertrans

Rahmawati, Triana (2014). “Sinergitastas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 4*. Malang: Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Brawijaya

- Situs Internet

<https://dispermasdes.semarangkab.go.id/>. Kamis, 8 Oktober 2020

<https://tni.mil.id/>. Kamis, 8 Oktober 2020

[Jatengprov.go.id/beritadaerah/danrem-073-makutarama-tutup-tmmd-desa-bonomerto/](http://jatengprov.go.id/beritadaerah/danrem-073-makutarama-tutup-tmmd-desa-bonomerto/). Sabtu, 10 Oktober 2020

- Data Dinas

Data Desa Bonomerto sebagai sasaran program TMMD reg-102 Kabupaten Semarang
PAP TMMD-102 Desa Bonomerto

Penjelasan dalam Kegiatan Launching Aplikasi E-TMMD dan indikator penentuan titik lokasi TMMD serta perwujudan sinergitastas TMMD di Gedung Graha Lt.2Setda Kab. Semarang
Rakor TMMD Kabupaten Semarang juni 2018